

**PENGARUH PENDUDUK DAN PDRB PER KAPITA
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
MELALUI PKB DAN BBNKB**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

SYNTIA OKKY PRATIWI

2012310505

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Syntia Okky Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 2 Oktober 1993
NIM : 2012310505
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Penduduk dan PDRB Perkapita terhadap Kemandirian Keuangan melalui Penerimaan PKB dan BBNKB

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal: *17 Februari 2016*

(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., Ca., Cta.)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal: *17 Februari 2016*

(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.si., OIA)

THE EFFECTS OF POPULATION NUMBER AND GDP PER CAPITA ON LOCAL FINANCE INDEPENDENCE THROUGH PKB AND BBNKB IN PROVINCE OF EAST JAVA PERIOD 2013-2014

Syntia Okky Pratiwi

Perbanas Surabaya

Email: syntiaokkypratiwi2@gmail.com

Jl. Nginden Semolo 34 -36 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of local development is to reach society welfare. The local government is necessary to increase the local revenue sources to meeting government finance in implementing regional development that be able to done by means improving Local Revenue (LR). Motor Vehicle Tax (MVT) and Motor Vehicle Rename Custom (MVRC) as part of local revenue as important component in Local revenue. Theoretically, the magnitude local revenue can be affected by population number and GDP per capita. The purpose of this research to identify the effect of population number and GDP per capita toward MVT and MVRC as well as local financial independence of the province of East Java within period 2013-2014. Data analysis gained from institutions of government of East Java and the technique that used is path analysis with linear regression model implementation. Population number and GDP per capita have negative effect on local revenue independency and the income of local financial and MVT and MVRC income as mediation variable.

Keywords: population number, GDP per capita, MVT and MVRC income, local revenue independency.

PENDAHULUAN

Salah tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siti, 2010 : 46). Pajak Daerah merupakan komponen

penting dalam PAD yang harus dikembangkan karena jumlah kontribusinya yang cukup besar. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Secara teoritis, besarnya pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil (Pande, 2013). Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap, sedangkan PDRB per kapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah

(regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2015). Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan PDRB per kapita dapat meningkatkan kemampuan masyarakat yang akan mempengaruhi minat atau daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan pula pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah maka akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Oesi, 2015). Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian keuangan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014, apakah PDRB per kapita mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014, apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014, apakah PDRB per kapita mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian

keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014, untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014, untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Pemungutan pajak

Pajak menurut Pasal UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah : Kontribusi wajib kepada Negara yang tentang oleh orang pribadi atau dan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat timbal baik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu : *self assessment system*, *official assessment system*, *withholding system* (Edy, 2014 : 5). Mardiasmo (2011 : 3), menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut :

Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Selain itu warga negara merupakan salah satu unsur dari suatu negara, maka sebagai warga negara wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2015). Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), migrasi.

PDRB per kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB perkapita diperoleh dari pembagian PDRB atas dasar harga berlaku dengan penduduk

pertengahan tahun. PDRB perkapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan orang yang sudah tua renta (BPS, 2015).

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Edy (2014 : 48), menyatakan bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengenaan PKB didasarkan pada hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu: nilai jual kendaraan bermotor, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha (Marihot, 2013:209). Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (9).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal/keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan partisipasi masyarakat di dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

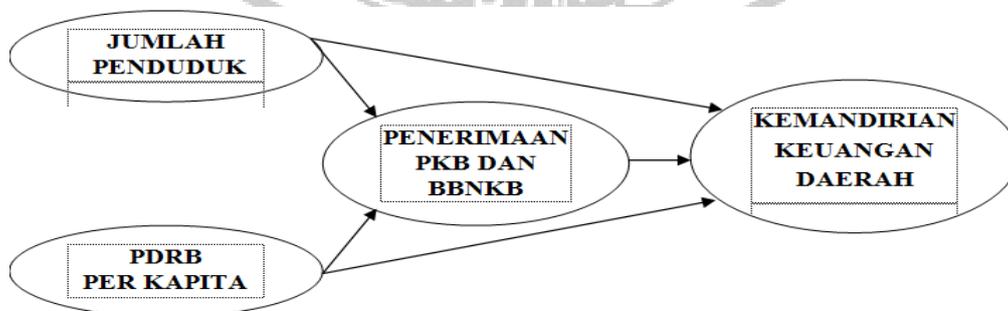
Penduduk mempunyai peran dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah begitu pula sebaliknya (Halim,2001).

Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Secara teoritis kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dipengaruhi oleh PDRB per kapita. Pembayaran atau kontribusi yang diberikan oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota dalam membayar pajak yang semakin meningkat dapat meningkatkan dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rutin daerah sehingga akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa kabupaten/kota tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

PKB dan BBNKB dikategorikan dalam pajak langsung dimana pengenaannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan pengenaannya secara berkala yaitu setahun sekali. Hal ini menjadi beban yang lebih ringan dibandingkan dengan pajak tidak langsung karena pajak yang dikenakan hanya satu kali dalam setahun, akibatnya kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi maka pendapatan pemerintah menjadi lebih tinggi dari sektor pajak dan redistribusi.

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Kemandirian Keuangan melalui Penerimaan PKB dan BBNKB

PDRB per kapita yang semakin meningkat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sekaligus peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Apabila seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor akan dikenakan tarif progresif. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak terutama penerimaan PKB dan BBNKB. PKB dan BBNKB merupakan sumber PAD, sehingga dengan meningkatnya penerimaan PKB dan BBNKB akan menyebabkan peningkatan PAD yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Hipotesis Penelitian

- H1 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.
- H2 : PDRB per Kapita berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.
- H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB, Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.
- H4 : PDRB per kapita berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dengan tipe kuantitatif, yaitu informasi datanya dalam satuan numerik, bersifat bulat atau pecahan dan interval. Data yang didapat bersifat sekunder.

Identifikasi Variabel

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel dependen, dan variable independen, serta variable intervening. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, dan PDRB per kapita. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penerimaan PKB dan BBNKB.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Jumah Penduduk

Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau banyaknya orang yang

berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Variabel ini diperoleh dari hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

PDRB Per kapita

Menurut konsep devinisi, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB perkapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah. Rumusan dalam menghitung PDRB per kapita adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Marihot (2013 : 175) mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor Pemungutan pajak kendaran bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintahan/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling

rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Marihot (2013 : 209) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Tarif BBN-KB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0.75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Tarif BBN-KB ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal/keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio

kemandirian keuangan daerah menggambarkan partisipasi/kontribusi masyarakat di dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{penerimaan PKB dan BBNKB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi = jumlah kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang berjumlah 38 kabupaten/kota. Penelitian ini memiliki rentang waktu 2 tahun yaitu mulai dari tahun 2013-2014. Dengan demikian jumlah amatan yang diteliti berjumlah 38 kabupaten/kota x 2 tahun = 76 populasi.

Sampel yang diambil dari populasi penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang menyediakan data lengkap dalam laporan PDRB dan laporan penerimaan PKB dan BBNKB.

Penelitian ini memiliki kriteria sampel kabupaten/kota dalam provinsi Jawa Timur yang memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), untuk menjadi sampel.

Tabel 1
Pengukuran Sampel

Keterangan	Kabupaten/Kota	Periode	Jumlah
Jumlah kabupaten/kota yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur	38	2	76
Kabupaten/kota yang tidak secara lengkap mempublikasi laporan jumlah penduduk, jumlah PDRB per kapita, dan laporan penerimaan PKB dan BBNKB untuk tahun 2013-2014	(8)	2	(16)
Jumlah data pengamatan selama dua tahun	30	2	60

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum (Imam Ghozali, 2011 : 98).

Analisis deskriptif

Hasil dari analisis ini akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JUMLAH PENDUDUK	60	547917	2833924	1154703,92	511929,841
PDRB PER KAPITA	60	11976600	128822500	30378938,33	23244819,859
PENERIMAAN PKB DAN BBNKB	60	351192757	225379313	2540825901	3929107273
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAREAH	60	43,529	8536,997	93,12,97462	06,666,080067
Valid N (listwise)	60				

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 547.917 orang berada di kabupaten Pacitan pada tahun 2013. Jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 2.833.924 orang berada di kota Surabaya pada tahun 2014. Nilai rata-rata jumlah penduduk di provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1.154.703,92 atau jika dibulatkan menjadi 1.154.704 orang. Nilai standar deviasi

untuk data jumlah penduduk adalah sebesar 511.929,841. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi < *mean* yang berarti data jumlah penduduk tahun 2013-2014 bersifat homogen atau merata.

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Nilai maximum untuk PDRB per kapita adalah sebesar Rp 128.822.500 dari kota

Surabaya tahun 2014. Nilai minimum PDRB per kapita adalah sebesar Rp 11.976.600 dari kabupaten Pamekasan tahun 2013. Nilai rata-rata PDRB per kapita di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sebesar Rp 30.378,938,33. Nilai standar deviasi untuk data PDRB per kapita adalah sebesar 23.244.819,859. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi < *mean* yang berarti data PDRB per kapita tahun 2013-2014 bersifat homogen atau merata.

Penerimaan PKB dan BBNKB

Nilai minimum untuk penerimaan PKB dan BBNKB adalah sebesar Rp 35.119.275.743 yang dihasilkan oleh kabupaten Sampang pada tahun 2013. Nilai maximum untuk penerimaan PKB dan BBNKB adalah sebesar Rp 2.253.793.138.536 yang dihasilkan oleh kota Surabaya pada tahun 2014. Nilai rata-rata untuk penerimaan PKB dan BBNKB adalah sebesar Rp 254.082.590.193,12.

Nilai standar deviasi untuk data penerimaan PKB dan BBNKB adalah sebesar Rp 392.910.727.306,666. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi > *mean* yang berarti data penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2013-2014 bersifat heterogen atau tidak merata.

Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai minimum untuk kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,529 yang dihasilkan kota Surabaya pada tahun 2014. Nilai maximum untuk kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,997 yang dihasilkan oleh kabupaten Ponorogo, Tuban, Sampang pada tahun 2013. Nilai rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 0,97462. Nilai standar deviasi untuk data kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,080067. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi < *mean* yang berarti data kemandirian keuangan daerah tahun 2013-2014 bersifat homogen atau merata.

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas
Jumlah Penduduk, PDRB Per Kapita, Penerimaan PKB Dan BBNKB
Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02418818
	Absolute	,158
Most Extreme Differences	Positive	,158
	Negative	-,112
Kolmogorov-Smirnov Z		1,227
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Pada tabel 4.3 hasil output spss terlihat bahwa uji normalitas dengan N:60 untuk model pertama yaitu jumlah penduduk, PDRB per kapita, penerimaan PKB dan BBNKB terhadap kemandirian keuangan daerah

dengan data menggunakan kolmogorof smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,098 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut berdistribusi normal. Besarnya kolmogorof smirnov adalah 1,227.

Tabel 4
Uji Normalitas
Jumlah Penduduk, PDRB Per Kapita
Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000621
	Std. Deviation	1738907078
	Absolute	01,53134000
Most Extreme Differences	Positive	,157
	Negative	-,129
	Kolmogorov-Smirnov Z	1,217
Asymp. Sig. (2-tailed)		,103

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.4 hasil output spss terlihat bahwa uji normalitas dengan N:60 untuk model kedua yaitu jumlah penduduk, PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB dengan data menggunakan kolmogorof smirnov

menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,103 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual

Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	1,087	53,629	0,000
Jumlah Penduduk	-9,738E-008	-6,06	0,000
Adjusted R Square	0,377		
F hitung	36,721		
Sig f	0,000		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel 5 sebesar 36,721 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk (X_1) memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dimana model persamaan regresi dapat dikatakan model yang baik. Pengujian model (Uji F) didapatkan persamaan model sebagai berikut :

$$Y = 1,087 - 9,738E-008 X_1 + e$$

Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,377. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian

keuangan daerah mampu dijelaskan melalui variabel jumlah penduduk sebesar 37,7%. Sedangkan sisanya 62,3% ($100\% - 37,7\% = 62,3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -6,060 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $\leq 0,05$, itu artinya variabel jumlah penduduk (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y).

Tabel 6
Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PKB dan BBNKB

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	-4,21661E+11	-5,127	0,000
Jumlah Penduduk	585209,452	8,975	0,000
Adjusted R Square	0,574		
F hitung	80,549		
Sig f	0,000		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel 6 sebesar 80,549 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk (X_1) memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X_3). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dimana model persamaan regresi dapat dikatakan model yang baik. Pengujian model (Uji F) didapatkan persamaan model sebagai berikut :

$$X_3 = -421661056225,626 + 585209,452 X_1$$

Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,574. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian

keuangan daerah mampu dijelaskan melalui variabel jumlah penduduk dan penerimaan PKB dan BBNKB sebesar 57,4%. Sedangkan sisanya 42,6% ($100\% - 57,4\% = 42,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 8,975 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel jumlah penduduk (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X_3).

Tabel 7
Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	0,992	98,589	0,000
Jumlah Penduduk	3,43E-08	3,351	0,001
Penerimaan PKB dan BBNKB	- 3,250E-013	-16,879	0,000
Adjusted R Square	0,894		
F hitung	250,695		
Sig f	0,000		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel 7 sebesar 250,695 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk (X_1), penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dimana model persamaan regresi dapat dikatakan model yang baik. Pengujian model (Uji F) didapatkan persamaan model sebagai berikut :

$$Y = 0,992 + 3,428E-008 X_1 - 3,250E-013 X_3 + e$$

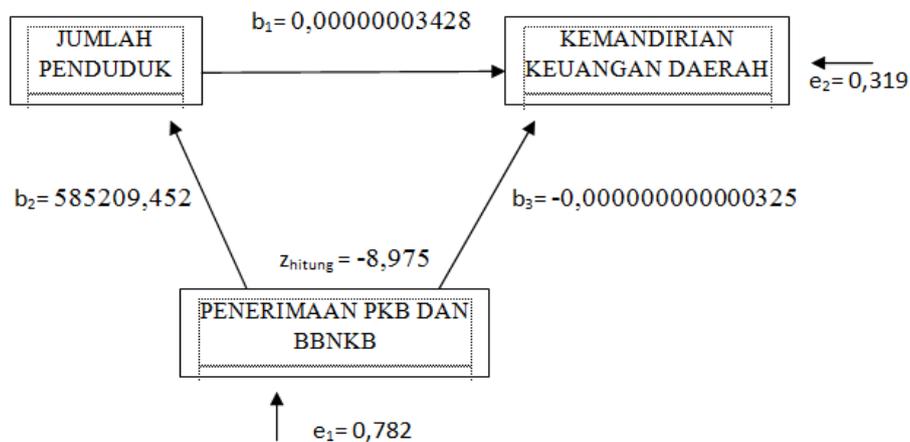
Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,894. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah mampu dijelaskan melalui variabel jumlah penduduk dan penerimaan PKB dan BBNKB sebesar 89,4%. Sedangkan sisanya 10,6% (100% -

89,4% = 10,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 3,351 dan nilai signifikansi 0,001. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel jumlah penduduk (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel penerimaan PKB dan BBNKB mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -16,879 dan nilai signifikansi 0,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y).

Gambar 2

Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB



Pengaruh langsung JP ke KK
 = b_1
 Pengaruh tidak langsung JP ke KK
 melalui Penerimaan PKB dan BBNKB
 = $b_2 \times b_3$
 Total pengaruh (korelasi JP ke KK)
 = $b_1 + (b_2 \times b_3)$

Nilai b_1 = 0,00000003428
 Nilai b_2 = 585209,452
 Nilai b_3 = -0,000000000000325

Jadi total pengaruhnya
 = $b_1 + (b_2 \times b_3)$
 = $0,00000003428 + (585209,452 \times -0,000000000000325)$
 = -0,00000015591

Besarnya e_1 dan $e_2 = \sqrt{1-R^2}$. Berikut perhitungan e_1 dan e_2 :

Nilai $e_1 = \sqrt{1-R^2}$
 = $\sqrt{1-0,388}$
 = 0,782

Nilai $e_2 = \sqrt{1-R^2}$
 = $\sqrt{1-0,898}$
 = 0,319

Koefisien $b_2 \times b_3$ menunjukkan pengaruh mediasi sebesar 0,000 untuk mengetahui

signifikan atau tidak dapat diuji dengan *Sobel Test* sebagai berikut:
 Menghitung Standar Error dari Koefisien Pengaruh Tidak Langsung (Sb_2b_3)

$$Sb_2b_3 = \sqrt{(b_3^2 \cdot Sb_2^2) + (b_2^2 \cdot Sb_3^2) + (Sb_2^2 \cdot Sb_3^2)}$$

$$= \sqrt{(0,000000000000325)^2 (65205,28)^2 + (585209,452)^2 (0,000)^2 + (65205,228)^2 (0,000)^2}$$

$$= \sqrt{4,49E-16 + 0 + 0}$$

$$= 2,119E-8$$

Nilai $b_2 \cdot b_3$
 = $585209,452 \times -0,000000000000325$
 = -0,000

Berdasarkan hasil uji sobel test dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{b_2 \cdot b_3}{Sb_2b_3} = \frac{-0,000}{0,000000021192}$$

$$= -8,975$$

Nilai $Z_{hitung} = -8,975$ dan nilai Z_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 = 1,96. Pada penelitian ini Z tabel dilihat dari dua arah, artinya nilai $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi signifikan dan dapat dikatakan sebagai variabel mediasi.

Tabel 8
Pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	1,053	92,17	0,000
PDRB Per Kapita	- 2,581E-009	-8,613	0,000
Adjusted R Square	0,554		
F hitung	74,186		
Sig f	0,000		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel 8 sebesar 74,186 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel di atas PDRB Per kapita memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dimana model persamaan

regresi dapat dikatakan model yang fit. Pengujian model (Uji F) didapatkan persamaan model sebagai berikut :

$$Y = 1,053 - 2,581E-009 X_2 + e$$

Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* menunjukkan

bahwa nilai R^2 sebesar 0,554. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah mampu dijelaskan melalui variabel PDRB per kapita sebesar 55,4%. Sedangkan sisanya 44,6% ($100\% - 55,4\% = 44,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita

mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -8,613 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel PDRB per kapita (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y).

Tabel 9
Pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	1,86556E+11	-4,293	0,000
PDRB Per Kapita	14504,736	12,727	0,000
Adjusted R Square	0,732		
F hitung	161,989		
Sig f	0,000		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel 9 sebesar 161,989 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel di atas PDRB Per Kapita memiliki (X_2) pengaruh terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dimana model persamaan regresi dapat dikatakan model yang baik. Pengujian model (Uji F) didapatkan persamaan model sebagai berikut :

$$X_3 = 186555884566,978 + 14504,736 X_2$$

Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,732. Hal ini dapat

dikatakan bahwa variabel penerimaan PKB dan BBNKB daerah mampu dijelaskan melalui variabel PDRB per kapita dan sebesar 73,2%. Sedangkan sisanya 26,8% ($100\% - 73,2\% = 26,8\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 12,727 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel jumlah penduduk (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PDRB per kapita (X_2).

Tabel 10
Pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	1,011	152,032	0,000
PDRB Per Kapita	7,16E-10	2,422	0,019
Penerimaan PKB dan BBNKB	- 3,273E-013	-12,991	0,000
Adjusted R Square	0,885		
F hitung	228,759		
Sig f	0,000		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel 10 sebesar 228,759 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan tabel di atas PDRB Per Kapita (X_2), penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dimana model persamaan regresi dapat dikatakan model yang fit. Pengujian model (Uji F) didapatkan persamaan model sebagai berikut :

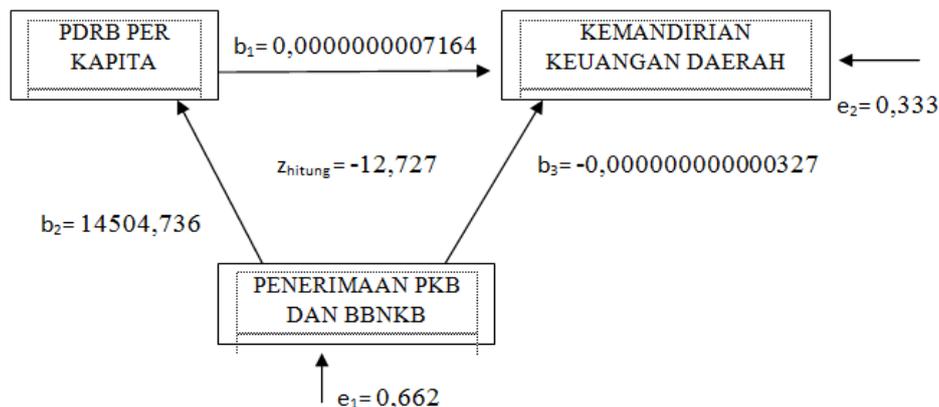
$$Y = 1,011 + 7,164E-010 X_2 - 3,273E-013 X_3 + e$$

Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,885. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah mampu dijelaskan melalui variabel PDRB per kapita dan penerimaan PKB dan BBNKB sebesar 88,5%. Sedangkan sisanya 11,5% (100% -

88,5% = 11,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,422 dan nilai signifikansi 0,019. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel PDRB per kapita (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel penerimaan PKB dan BBNKB mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -12,991 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai signifikansi $< 0,05$, itu artinya variabel penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Y).

Gambar 3
Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB



Pengaruh langsung PDRB ke KK = b_1 Nilai b_3 = -0,000000000000327

= b_1

Pengaruh tidak langsung PDRB ke KK melalui penerimaan PKB dan BBNKB

= $b_2 \times b_3$

= $b_2 \times b_3$

Jadi total pengaruhnya

Total pengaruh (korelasi PDRB ke KK)

= $b_1 + (b_2 \times b_3)$

= $b_1 + (b_2 \times b_3)$

= 0,0000000007164 + (14504,736 x 0,000000000000327)

Nilai b_1 = 0,0000000007164

= -0,000000004031

Nilai b_2 = 14504,736

Besarnya e_1 dan $e_2 = \sqrt{1-R^2}$.

Berikut perhitungan e_1 dan e_2 :

$$\begin{aligned}\text{Nilai } e_1 &= \sqrt{1-R^2} \\ &= \sqrt{1-0,561} \\ &= 0,662\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai } e_2 &= \sqrt{1-R^2} \\ &= \sqrt{1-0,889} \\ &= 0,333\end{aligned}$$

Koefisien $b_2 \times b_3$ menunjukkan pengaruh mediasi sebesar -0,00000000475 untuk mengetahui signifikan atau tidak dapat diuji dengan *Sobel Test* sebagai berikut:

Menghitung Standar Error dari Koefisien Pengaruh Tidak Langsung (Sb_2b_3)

$$\begin{aligned}Sb_2b_3 &= \sqrt{(b_3^2 \cdot Sb_2^2) + (b_2^2 \cdot Sb_3^2) + (Sb_2^2 \cdot Sb_3^2)} \\ &= \sqrt{(-0,0000000000000327)^2} \\ &\quad + (1139,64)^2 + (14504,736)^2 \\ &\quad + (0,000)^2 + (1139,64)^2 \cdot (0,000)^2\end{aligned}$$

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Waluyo (2012), mengatakan bahwa semakin banyak penduduk akan membuat bertambahnya jumlah konsumsi penduduk, maka jumlah penerimaan dari retribusi dan pajak pun akan bertambah, secara otomatis pendapatan asli daerah akan ikut bertambah. Peningkatan PAD ini kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah di suatu kabupaten/kota, artinya daerah tersebut bisa secara mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya, selain itu pembangunan daerah bisa tercapai secara maksimal. Peningkatan jumlah penduduk ini berimbas pada kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Timur yang menurun sebesar 2 persen dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat, maka jumlah konsumsi penduduk juga meningkat sehingga perolehan PAD juga ikut meningkat. PAD dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan pembagi dari penerimaan PKB dan BBNKB, sehingga semakin tinggi jumlah PAD akan

$$= \sqrt{1,388E-19 + 0 + 0}$$

$$= 3,73E-10$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai } b_2 \cdot b_3 &= 14504,736 \times -0,0000000000000327 \\ &= -0,00000000475\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji sobel test dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}Z_{\text{hitung}} &= \frac{b_2 \cdot b_3}{Sb_2b_3} = \frac{-0,00000000475}{0,0000000003730} \\ &= -12,727\end{aligned}$$

Nilai $Z_{\text{hitung}} = -12,727$ dan nilai Z_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 = 1,96. Pada penelitian ini Z tabel dilihat dari dua arah, artinya nilai $Z_{\text{hitung}} < Z_{\text{tabel}}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi -12,727 signifikan dan dapat dikatakan sebagai variabel mediasi.

mengakibatkan semakin menurunnya rasio kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari jumlah kontribusi. Hal ini dapat diartikan apabila jumlah penduduk tinggi maka rasio keuangan daerah menjadi rendah.

Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat tercapai apabila pemerintah daerah bisa meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu dengan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen dari PAD adalah pajak daerah. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak secara teoritis dipengaruhi oleh PDRB per kapita. Pembayaran atau kontribusi yang diberikan oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota dalam membayar pajak yang semakin meningkat dapat meningkatkan dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rutin daerah sehingga akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Peningkatan PDRB per kapita ini berimbas pada kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Timur yang menurun

sebesar 2 persen dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini dikarenakan kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi maka kemampuan setiap penduduk untuk membayar segala macam pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah semakin meningkat, akibatnya PAD yang terima menjadi meningkat. PAD dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan pembagi dari penerimaan PKB dan BBNKB, sehingga semakin tinggi jumlah PAD akan mengakibatkan semakin menurunnya rasio kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari jumlah kontribusi. Hal ini dapat diartikan apabila PDRB per kapita tinggi maka rasio keuangan daerah menjadi rendah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Penerimaan PKB Dan BBNKB

Jumlah penduduk yang tinggi semakin tinggi pula kebutuhan salah satunya dalam hal transportasi. Kabupaten/kota yang masyarakatnya banyak dan memiliki kendaraan bermotor maka penerimaan PKB dan BBNKB akan meningkat. PKB dan BBNKB dikategorikan dalam pajak langsung dimana pengenaannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan pengenaannya secara berkala yaitu setahun sekali. Hal ini dapat diartikan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dapat diartikan bahwa jumlah orang yang ikut berkontribusi dalam membayar pajak semakin banyak, akibatnya PAD menjadi meningkat. Kondisi ini membuat suatu daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk dan penerimaan PKB dan BBNKB ini berimbas pada kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Timur yang menurun sebesar 2 persen dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat, maka jumlah konsumsi penduduk salah satunya

dalam hal transportasi juga ikut meningkat. Kabupaten/kota yang masyarakatnya banyak dan memiliki kendaraan bermotor maka penerimaan PKB dan BBNKB akan meningkat. PKB dan BBNKB merupakan bagian dari pajak daerah yang merupakan komponen utama dari PAD. Hal ini dapat diartikan bahwa, penerimaan PKB dan BBNKB yang meningkat maka perolehan PAD juga ikut meningkat. PAD dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan pembagi dari penerimaan PKB dan BBNKB, sehingga semakin tinggi jumlah PAD akan mengakibatkan semakin menurunnya rasio kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari jumlah kontribusi. Hal ini dapat diartikan apabila jumlah penduduk dan penerimaan PKB dan BBNKB yang tinggi maka rasio keuangan daerah menjadi rendah. Berdasarkan perhitungan langsung dan tidak langsung untuk pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB dapat diketahui nilai $Z_{hitung} = -8,975$, dan nilai Z_{tabel} dengan tingkat signifikansi $0,05 = 1,96$ dimana $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi signifikan dan dapat dikatakan sebagai variabel mediasi.

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Penerimaan PKB Dan BBNKB

Pendapatan seseorang dapat digambarkan melalui PDRB perkapita yang menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, selain itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. PKB dan BBNKB peneganaan pajaknya disesuaikan dengan daya pikul atau kemampuan wajib pajak tersebut dengan tarif pajak yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Peningkatan PDRB per kapita dan penerimaan PKB dan BBNKB ini berimbas pada kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Timur yang menurun sebesar 2 persen dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini dikarenakan PDRB per kapita yang meningkat, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, selain itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang dapat meningkatkan PAD. PAD dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan pembagi dari penerimaan PKB dan BBNKB, sehingga semakin tinggi jumlah PAD akan mengakibatkan semakin menurunnya rasio kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari jumlah kontribusi. Hal ini dapat diartikan apabila PDRB per kapita dan penerimaan PKB dan BBNKB yang tinggi maka rasio keuangan daerah menjadi rendah.

Berdasarkan perhitungan langsung dan tidak langsung untuk pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB dapat diketahui nilai $Z_{hitung} = -12,727$, dan nilai Z_{tabel} dengan tingkat signifikansi $0,05 = 1,96$ dimana $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi signifikan dan dapat dikatakan sebagai variabel mediasi.

Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh PDRB per kapita

terhadap kemandirian keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel mediasi.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel mediasi.

Keterbatasan penelitian ini yaitu berdasarkan data sekunder yang diambil dari BPS dan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, tidak berdasarkan observasi secara langsung sehingga kurang dapat digali lebih dalam tentang kemandirian keuangan daerah.

Saran bagi peneliti selanjutnya penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Oesi. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengolahan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).

- Abdul, Halim. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta : YKPN.
- Abdul, Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi 6. Semarang : Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Ni Nyoman, I Made, Dan Wirathi. 2013. *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010*.
- Siti, Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marihot, Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Edy, Suprianto. 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Semarang: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.